



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARWAN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
3. NHK : 121366

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/140 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Bangunan Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 201.500.000

1. MOBIL, TOYOTA ALL NEW INNOVA G Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 113.496.120

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 183.620.816

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.348.616.936

III. HUTANG

Rp. 290.767.301



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.057.849.635

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.